

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PERANGKAT DESA
DI DESA LONG BANG HULU
KECAMATAN PESO HILIR KABUPATEN BULUNGAN**



PROPOSAL

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Tugas Gelar Sarjana (S1)

Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Kaltara

Disusun Oleh

Nandi Adriyan Iban

202151018

PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KALTARA

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep.....	7
2.1.1 Disiplin Kerja.....	7
2.1.2 Pemerintah Desa.....	7
2.2 Penelitian Terdahulu	8
2.3 Kajian Teori.....	9
2.3.1 Displin Kerja	9
2.3.2 Pemerintah Desa.....	12
2.3.3 Perangkat Desa.....	14
2.4 Kerangka Berfikir	16
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
3.1 Loksasi Penelitian.....	20
3.2 Jenis Penelitian	20
3.3 Fofus Penelitian	21
3.4. Keabsahan Data	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5.1 Observasi.....	25
3.5.2 Wawancara	26
3.5.3 Dokumentasi	26
3.6 Teknik Analisis Data	26

3.6.1 Pengumpulan Data	27
3.6.2 Reduksi Data	27
3.6.3 Penyajian Data	28
3.6.4 Penarikan Kesimpulan.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan di atas memberikan peluang bagi desa untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, Desa identik dengan keindahan, kehijauan sawah dan kesederhanaan, desa menjadi tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara segala urusan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya, dan kepentingan masyarakat setempat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut menerangkan bahwa pemerintah desa adalah garda terdepan dalam segala urusan desa atau penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah dilaksanakan oleh, kepala desa dan dibantu oleh aparat-aparatnya sebagai unsur penyelenggaraan di pemerintahan tingkat desa. Perangkat desa yang mengemban tugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari beberapa

tugas dan fungsi seperti, Sekretaris desa, Kepala pemerintahan, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan TU dan umum, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu desa adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh perangkat desa. SDM yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi akan berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan desa yang lebih efektif.

Di Desa Long Bang Hulu, kedisiplinan perangkat desa menjadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disiplin kerja yang baik mencakup ketepatan waktu, keterampilan, loyalitas, serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Namun, masih ditemukan beberapa kendala terkait kedisiplinan perangkat desa, seperti kurangnya kesadaran terhadap aturan kerja, rendahnya tingkat kehadiran, serta kurangnya keterampilan dalam mengelola administrasi desa.

Namun, di Desa Long Bang Hulu, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan disiplin kerja perangkat desa. Beberapa kendala yang terlihat mencakup ketidaktepatan waktu dalam kehadiran, penundaan dalam menyelesaikan tugas, serta kurangnya pemanfaatan waktu kerja yang telah disediakan. Selain itu, efektivitas pelayanan di kantor desa juga masih perlu ditingkatkan. Banyak perangkat desa yang sering mengajukan izin untuk kepentingan pribadi dan keluarga, sehingga tugas dan tanggung jawab yang

telah dipercayakan oleh masyarakat menjadi terabaikan. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan menghambat efektivitas jalannya pemerintahan desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketegasan dan peran Kepala Desa dalam menegakkan disiplin sangat dibutuhkan. Kepala Desa harus mampu memberikan sanksi yang tegas kepada perangkat desa yang melanggar aturan, serta menerapkan sistem evaluasi yang ketat agar setiap perangkat desa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perencanaan program terkait disiplin kerja perangkat desa perlu disusun secara sistematis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan perangkat desa, memperbaiki kualitas pelayanan, serta membangun kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dalam bekerja.

Berdasarkan kondisi dan realita saat ini, khususnya dalam pemerintahan Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan perangkat desa di sana masih sangat jauh dari harapan. Salah satu faktor nya adalah perilaku sejumlah perangkat desa yang sengaja mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka di kantor desa. Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat setempat. Karena penyebab munculnya pengabaian tugas ini bisa disebabkan oleh minimnya rasa tanggung jawab dari para perangkat desa. Yang di mana mereka lebih mementingkan urusan pribadi, sehingga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka yang harus mereka kerjakan di kantor. Kebiasaan ini, jika dibiarkan, bisa menjalar dan mempengaruhi kinerja

seluruh perangkat desa lainnya. Masyarakat pun satu-persatu akan kehilangan kepercayaan kepada perangkat yang ada, yang seharusnya melayani dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil. Pertama, penegakan aturan yang tegas bagi perangkat desa yang tidak disiplin dan tidak menjalankan tugas mereka. Misalnya, bisa diterapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Kedua, diadakan program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perangkat desa. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, mereka bisa memahami betul pentingnya peran mereka di masyarakat dan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas dengan baik. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan kondisi pemerintahan desa di Long Bang Hulu bisa meningkat, pelayanan kepada masyarakat jadi optimal, dan kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa bisa pulih kembali. Dengan demikian, disiplin dalam berkerja sangat di butuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih profesional dan berdaya saing. Dan upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan lebih baik.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis mempunyai keinginan atau ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai, Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Perangkat Desa Di Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan. dengan mengangkat judul

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Perangkat Desa Di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang di jadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah?

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa di Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kedisiplin kerja perangkat desa di Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang di jadikan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa di Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir Kabupaten bulungan.
2. Menganalisis kendala yang muncul dalam pelaksanaan kedisiplin kerja perangkat desa di Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun manfaat yang di maksud :

1. Teoritis

Menambah wawasan dan literatur mengenai strategi peningkatan disiplin kerja dalam pemerintahan desa

2. Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam mengoptimalkan kebijakan disiplin kerja perangkat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep yang perlu diidentifikasi dan dibatasi agar fokus yang diangkat dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut:

2.1.1 Disiplin Kerja

Disiplin kerja dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai sikap dan perilaku yang diharapkan dari perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Aspek-aspek yang akan diteliti mencakup ketepatan waktu dalam kehadiran, penyelesaian tugas, loyalitas, serta pemanfaatan waktu kerja yang efektif. Dengan memahami disiplin kerja, diharapkan dapat diketahui sejauh mana perangkat desa mampu melaksanakan tanggung jawabnya demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk menciptakan dan menerapkan kebijakan di tingkat desa. Dalam penelitian ini, pemerintah desa akan dilihat dari segi wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan membina perangkat desa. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kedisiplinan akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa. Misalnya, penelitian oleh Rahmawati (2019) yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai negeri di desa. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen yang baik, komunikasi yang efektif, dan pemberian reward dapat meningkatkan disiplin kerja perangkat desa secara signifikan.

Selanjutnya, penelitian oleh Hasan (2020) mengungkapkan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas juga berkontribusi terhadap peningkatan disiplin kerja. Dalam penelitiannya, Hasan menemukan bahwa setelah mengikuti pelatihan manajemen waktu dan kepemimpinan, para perangkat desa menunjukkan peningkatan disiplin dalam menjalankan tugas mereka.

Di sisi lain, penelitian oleh Supriyadi (2021) memfokuskan pada peran budaya kerja dalam disiplin kerja perangkat desa. Dia menemukan bahwa budaya kerja yang positif, yang didukung oleh komunitas lokal, berpengaruh besar terhadap kinerja dan disiplin perangkat desa.

Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah diidentifikasi dalam penelitian-penelitian tersebut, masih ada kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih dalam konteks spesifik Desa Long Bang Hulu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang upaya pemerintah

setempat dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa.

2.3 Kajian Teori

2.3.1 Disiplin Kerja

Disiplin kerja adalah salah satu hal penting dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, karena semakin baik pegawai maka semakin tinggi efektivitas kerja yang dicapainya. Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Pembahasan disiplin pegawai dalam manajemen sumber daya manusia berkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya.

Disiplin kerja terkait erat dengan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan standar kerja yang harus dicapai oleh suatu organisasi dalam menjalankan tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut “Ajabar (2020: 45)” menyatakan bahwa “Disiplin kerja adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar –standar operasional”. Lebih lanjut menurut “Sutrisno (2015:45)” , menyatakan “Disiplin kerja adalah suatu sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya”.

Menurut “Prihantoro (2015:16)” menyatakan disiplin adalah tindakan manajemen untuk memberikan semangat kepada pelaksanaan standar organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah pada upaya membernarkan dan melibatkan pengetahuan – pengetahuan sikap dan perilaku pegawai sehingga ada kemauan diri pegawai untuk menuju pada kerjasama dan prestasi yang lebih baik.

Menurut “Mardi Astutik (2016:145)” menyatakan bahwa “Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati. Sedangkan kerja adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkannya. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat”.

Menurut “Hasibuan (2015:132)” 9 menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang ada dalam suatu organisasi pemerintah. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Dia akan mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas dasar paksaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan organisasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Singodimenjo dalam Sutrisno (2011:86), variabel-variabel berikut mempengaruhi seberapa disiplin individu dalam bekerja:

a. Penghargaan

Tingkat gaji mungkin berdampak pada pemeliharaan disiplin. Ketika pekerja merasa bahwa mereka akan diberi kompensasi atas upaya yang mereka lakukan di perusahaan, mereka akan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

b. Jika bisnis dipimpin oleh orang yang berkompeten.

Karena semua pekerja terus-menerus menyadari bagaimana manajer dapat menghukum diri mereka sendiri, kepemimpinan yang baik sangat penting dalam bisnis. Setiap perilaku yang akan melanggar pedoman disiplin yang ada.

c. Apakah ada aturan tertentu yang harus dipatuhi

Tidak ada disiplin yang dapat tumbuh di dalam organisasi kecuali ada aturan tertulis yang eksplisit yang harus dipatuhi sebagai standar yang seragam.

d. Tekad manajer untuk hanya mengambil tindakan terbatas

Manajer harus berani mengambil tindakan korektif ketika karyawan peraturan.

e. Pengawasan

Karyawan harus diawasi untuk memastikan mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan tepat dan sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam semua operasi yang dilakukan oleh organisasi, terutama jika ada tinjauan manajemen.

f. Perhatian terhadap pekerja

Karyawan adalah individu yang berbeda dan memiliki beberapa karakter.

2.3.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah salah satu bentuk pemerintahan yang terendah dalam hierarki pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertugas untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal.

1. Struktur dan Tugas Pemerintahan Desa Pemerintah desa memiliki struktur yang sederhana namun fungsional, dimana di dalamnya terdapat:

- Kepala Desa: Pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum. Tanggung jawabnya meliputi pengambilan keputusan strategis, pengorganisasian lembaga desa, dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.
- Perangkat Desa: Terdiri dari berbagai jabatan seperti Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas mereka. Tugas mereka meliputi pengadministrasian, pelaksanaan program pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

2. Fungsi Pemerintahan Desa Pemerintah desa memiliki beberapa fungsi penting:

- Penyelenggaraan Administrasi: Mengelola segala bentuk administrasi pemerintah di tingkat desa, seperti pencatatan data penduduk, keuangan desa, dan dokumen penting lainnya.

- Pembangunan Desa: Berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat.
 - Pelayanan Masyarakat: Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.
3. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemerintahan desa harus berjalan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dengan prinsip ini, diharapkan masyarakat bisa lebih aktif berperan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
 4. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Pemerintah desa memiliki peran yang krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di tingkat desa akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, disiplin dan kinerja perangkat desa menjadi faktor penentu dalam keberhasilan berbagai program yang dilaksanakan.

Menurut Achmad Nurmandi (2017): Achmad Nurmandi dalam bukunya menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah organisasi yang dibentuk untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa. Ia menekankan bahwa efektifitas pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap

kebijakan yang diambil. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Menurut Mardani (2018): Mardani menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam pandangannya, pemerintahan desa bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mardani juga menyoroti pentingnya sistem manajemen yang baik di dalam pemerintahan desa untuk menjamin pelayanan publik yang maksimal.

2.3.3 Perangkat Desa

Perangkat desa adalah sekelompok individu yang diangkat untuk membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Menurut Darmadi (2022), perangkat desa memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdiri dari beberapa posisi, seperti kepala dusun, sekretaris desa, dan bendahara, yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik.

1. Fungsi dan Peran Perangkat Desa

- a. Pelayanan Publik Perangkat desa bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi warga. Hal ini mencakup administrasi kependudukan, pengembangan infrastruktur, dan pelayanan sosial. Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa efisiensi

dan transparansi dalam pelayanan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.

- b. Komunikasi dan Hubungan Antara Warga dan Pemerintah Perangkat desa berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat. Mereka menyampaikan informasi tentang program-program pemerintah, termasuk vaksinasi, pembangunan, dan lainnya. Suharto (2017) menekankan pentingnya komunikasi dua arah dalam pembangunan desa.
- c. Pengelolaan Anggaran Desa Pengelolaan keuangan desa adalah salah satu aspek terpenting yang dilakukan oleh perangkat desa. Mereka harus mampu merencanakan dan menggunakan anggaran secara efektif dan akuntabel. Ginting (2019) menyoroti bahwa perangkat desa perlu memiliki kemampuan akuntansi untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Teori Administrasi Publik dalam Konteks Perangkat Desa

Teori administrasi publik sangat relevan dalam memahami peran perangkat desa. Hatta (2020) menjelaskan bahwa administrasi publik mencakup proses penataan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintahan secara efektif. Dalam konteks desa, ini berarti perangkat desa harus bisa mengelola sumber daya manusia dan keuangan dengan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah bagian integral dari kerja perangkat desa. Menurut Suharto (2017), perangkat desa harus bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap rencana pembangunan. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan warga dalam musyawarah desa, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

4. Tanggung Jawab Sosial Perangkat Desa

Perangkat desa juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendengarkan dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Darmadi (2022) menjelaskan bahwa perangkat desa harus peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, serta mampu memberikan solusi yang relevan, baik dalam hal pembangunan fisik maupun sosial.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah salah satu konsep krusial dalam memahami cara seseorang dalam menganalisis dan memproses informasi. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas pengertian kerangka berfikir menurut beberapa ahli dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya kerangka berfikir dalam pengambilan keputusan dan pemahaman informasi. Menurut Baker dan McKenzie (2020: 45-46), kerangka berpikir dapat diartikan sebagai sekumpulan konsep dan ide yang membangun struktur pemikiran seseorang. Dengan memiliki kerangka berpikir yang jelas, individu

dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, Carnegie (2021: 78-79) menjelaskan bahwa kerangka berpikir berfungsi sebagai peta mental yang membantu individu dalam memecahkan masalah. Peta mental ini berperan dalam mengorganisir pemikiran, sehingga dapat memudahkan penentuan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Johnson (2022: 30-31) menambahkan bahwa kerangka berpikir merupakan cara individu memandang dunia, yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan budaya yang dimiliki. Hal ini menyebabkan setiap orang memiliki kerangka berpikir yang unik, yang akan memengaruhi cara mereka dalam menerima dan memahami informasi.

Terakhir, Tharp (2023: 22-23) menyatakan bahwa kerangka berpikir dapat menciptakan dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan yang efektif. Dengan adanya kerangka yang jelas dan terstruktur, individu akan lebih objektif dan terarah dalam menganalisis situasi, sehingga keputusan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan elemen penting yang mempengaruhi cara seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Pemahaman yang mendalam terkait kerangka berpikir akan membantu individu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Perangkat Desa di Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan. Pemerintah desa Long Bang Hulu bisa melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan disiplin kerja perangkat desanya. Pertama, mereka bisa memberikan penghargaan berupa insentif atau tunjangan yang layak, sehingga perangkat desa merasa dihargai atas kerja kerasnya. Selanjutnya, penting bagi kepala desa untuk menjadi pemimpin yang kompeten dan memberi contoh yang baik, biar perangkat desa termotivasi untuk disiplin. Selain itu, pemerintah desa perlu menyusun aturan yang jelas dan tegas mengenai standar kerja yang harus dipatuhi oleh perangkat desanya. Jika ada pelanggaran, kepala desa harus berani mengambil tindakan korektif demi menjaga ketertiban. Pengawasan yang rutin dan berkala juga diperlukan untuk memastikan semua perangkat desa menjalankan tugas sesuai ketentuan. Terakhir, perhatian terhadap kebutuhan dan masalah perangkat desa harus diberikan agar mereka merasa diperhatikan, sehingga loyalitas dan disiplin mereka meningkat. Dengan menggabungkan semua upaya ini, disiplin kerja perangkat desa di Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan, bisa meningkat. Adapun kerangka konsep berfikir pada penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul di atas bahwa peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun alasan kenapa peneliti melakukan penelitian di Desa Long Bang Hulu, Karena Peneliti sudah mengenali tempat dan lokasi tersebut, jadi peneliti cukup mengetahui tentang kondisi pemerintah desa dan perangkat desa yang menjadi tujuan Penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana subjek penelitian mengalami, merasakan, dan menginterpretasikan fenomena tertentu dalam konteks sosial mereka. Seperti yang disampaikan oleh Creswell & Poth (2017), "Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang kompleks yang berfokus pada pengertian atau interpretasi suatu fenomena dari perspektif orang-orang yang terlibat." Jadi, dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk menggali pengalaman dan pandangan individu secara mendalam, sehingga dapat menghasilkan data yang kaya dan bermanfaat.

Metode studi kasus dipilih sebagai cara untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada satu kasus tertentu, yang memungkinkan penulis untuk menganalisis detail dan

konteks yang relevan dengan lebih efektif. Baxter & Jack (2008) menjelaskan bahwa "Studi kasus merupakan metode yang sangat berguna untuk eksplorasi fenomena yang belum sepenuhnya dipahami," memberikan peneliti kemampuan untuk melihat peristiwa dalam konteks yang lebih holistik.

Data akan dikumpulkan melalui teknik-teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Menurut Flick (2018), "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus fleksibel dan adaptif, agar sesuai dengan konteks dan dinamika lapangan." Dengan menggabungkan berbagai sumber data ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai fenomena yang sedang dipelajari dan membantu menemukan pola-pola atau tema-tema yang signifikan.

Secara keseluruhan, jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang yang diteliti serta memberikan wawasan baru bagi praktisi dan akademisi terkait. Dalam hal ini, Yin (2018) menyatakan bahwa "Studi kasus memberikan peneliti kesempatan untuk mendalami fenomena kompleks dan memahami kondisi yang melatarbelakanginya."

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada hasil observasi yang dilakukan peneliti untuk menarik masalah yang ditemukan secara langsung di pemerintah desa

Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Tentang “ Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Perangkat Desa di Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan”.

3.4. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek krusial yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan layak dijadikan sebagai karya ilmiah. Keabsahan data bukan hanya berfungsi untuk disanggah dari tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memang berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah yang kuat.

Dalam konteks ini, beberapa ahli telah mengemukakan pandangan mereka mengenai keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2018) dalam bukunya “Research Design,” uji keabsahan data terdiri dari beberapa aspek seperti kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas. Creswell menekankan bahwa keabsahan data sangat penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan pengalaman subjektif partisipan.

Uji keabsahan data meliputi beberapa aspek penting yang sering digunakan oleh para peneliti:

1. Credibility (Kredibilitas): Uji kredibilitas mengacu pada kepercayaan terhadap data yang disajikan oleh peneliti. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh:

- Perpanjangan Pengamatan: Melakukan pengamatan berulang di lapangan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data. Dengan berkunjung kembali, peneliti dapat melakukan wawancara tambahan dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Hubungan yang terbina antara peneliti dan narasumber juga membuat data yang diperoleh lebih kaya dan lengkap.
- Meningkatkan Kecermatan: Dalam proses penelitian, ketekunan untuk mencatat data dengan detail dan akurat sangat penting. Peneliti perlu membaca referensi terkait dan membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa data yang disajikan tidak hanya akurat, tetapi juga berkualitas. Korstjens dan Moser (2018) menjelaskan bahwa kecermatan dalam mendokumentasikan data akan memperkuat argumen penelitian.
- Triangulasi: Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi data dari berbagai sumber atau dengan berbagai teknik. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Wiersma (1986) menyebutkan bahwa triangulasi memperkuat kredibilitas data dengan membandingkan temuan dari metode yang berbeda. Pendekatan ini membantu peneliti mengkonfirmasi konsistensi data.

- Analisis Kasus Negatif: Mencari dan menganalisis data yang bertentangan dengan temuan awal juga merupakan cara efektif untuk menguji keabsahan. Merriam & Tisdell (2016) menggarisbawahi pentingnya analisis kasus negatif dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bias.
 - Membercheck: Proses ini melibatkan verifikasi hasil dengan narasumber untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Sugiyono (2018) menekankan pentingnya membercheck untuk menjaga keakuratan dan integritas data.
2. Transferability (Transferabilitas): Validitas eksternal ini melihat seberapa baik hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Noble dan Smith (2015) menyatakan bahwa transferability sangat bergantung pada detail konteks yang disajikan oleh peneliti sehingga orang lain dapat menilai relevansi hasil penelitian di situasi sosial yang berbeda.
 3. Dependability (Dependabilitas): Reliabilitas atau dependabilitas berhubungan dengan stabilitas hasil penelitian. Penelitian yang baik harus menghasilkan temuan yang stabil dan dapat diulang oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara audit menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian oleh auditor independen. Menurut Yin (2018), audit ini membantu memverifikasi bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat diandalkan.
 4. Confirmability (Konfirmabilitas): Menguji objektivitas hasil penelitian sangat penting untuk keabsahan data. Flick (2018) menyatakan bahwa

confirmability berarti hasil penelitian bisa dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Peneliti perlu menjaga transparansi dalam setiap langkah yang diambil agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bias.

Secara keseluruhan, keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah fondasi yang memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semua metode di atas, jika diterapkan dengan baik, akan membantu menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan secara langsung, yang dilakukan seorang peneliti terhadap fenomena atau peristiwa berdasarkan apa yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan informasi. menurut (Morissan,2017:143) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Dalam hal ini pancaindra digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung melalui Tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Sedangkan Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut :

3.6.1 Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

3.6.2 Reduksi Data

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.6.3 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajabar. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit XYZ, hlm. 45.
- Astutik, Mardi. (2016). Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit ABC, hlm. 145.
- Baker, J., & McKenzie, R. (2020). Kerangka Berpikir dalam Pemecahan Masalah. Yogyakarta: Penerbit XYZ.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559.
- Carnegie, D. (2021). Peta Mental dan Kerangka Berpikir. Jakarta: Penerbit ABC.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed., pp. 202-215). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darmadi, B. (2022). Sistem Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 85-100.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed., pp. 475-498). Sage Publications.
- Ginting, R. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung: Nuansa, hlm. 70-90.
- Hasibuan, Malayu S.P.H. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Nusa Media, hlm. 132.
- Hasan, A. (2020). Peningkatan disiplin kerja melalui pelatihan bagi perangkat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123-135.
- Hatta, A. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Tingkat Desa. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 60-75.
- Johnson, M. (2022). Pola Pikir dan Kebudayaan. Bandung: Penerbit DEF.
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Basic Janus and All-Effects Sampling. Thinking in detail: The constitution of qualitative research judgments and the importance of 'quality in qualitative research'. *Qualitative Research*, 18(1), 44-61. doi:10.1177/1468794117744102.
- Mardani. (2018). Peran Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ABC.

- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed., pp. 241-267). Jossey-Bass.
- Noble, H., & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research. *Evidence Based Nursing*, 18(2), 34-36. doi:10.1136/eb-2015-102129.
- Prihantoro. (2015). *Pengelolaan Disiplin Kerja di Perusahaan*. Surabaya: Penerbit Ikhtiar, hlm. 16.
- Rahmawati, N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai negeri di desa. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 34-45.
- Singodimenjo dalam Sutrisno, E. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm. 86.
- Sutrisno, E. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, hlm. 45.
- Supriyadi, R. (2021). Peran budaya kerja dalam disiplin kerja perangkat desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Manajemen*, 6(3), 88-99.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2018, pp. 267-302). Alfabeta.
- Tharp, L. (2023). *Analisis dan Pengambilan Keputusan yang Efektif*. Surabaya: Penerbit GHI.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed., pp. 88-100). Sage Publications.